

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek yang memegang peranan krusial dari ketahanan nasional adalah ketahanan nasional di bidang ekonomi dan pangan (Herjito & Setiawan, 2021). Dari segi penguatan ketahanan nasional dalam sektor ekonomi dan penguatan daya saing negara, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) sektor keutamaan dasar, yaitu: 1) Sektor swasembada makanan atau ketahanan pangan; 2) Ketersediaan sumber tenaga untuk dasar perindustrian dalam berbagai sektor 3) Dasar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik 4) Memperkuat dasar dalam sektor kewangan. Ketahanan pangan merupakan suatu bidang yang menjadi urgent Ketika semua masyarakat tidak lagi mau menanam atau Bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri. Dalam penguatan bidang ketahanan pangan pemerintah sudah melakukan inovasi serta perumusan sejumlah payung hukum dari pusat sampai dengan daerah yang diharapkan dapat mencukupi perminataan masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Pangan serta energi merupakan dua perkara yang tidak dapat dipisahkan dan menyokong kehidupan manusia (Rhofita, 2022). Untuk itu ketersediaan pangan adalah suatu elemen penting bagi suatu negara.

Negara Indonesia yang notabnya adalah negara agraris dan meimilki iklim tropis serta banyaknya barisan pegunungan yang ada diwilayahnya menjadikan Indonesia negara dengan kontras tanah yang subur. Untuk itu potensi dalam sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam bidang ekonomi. Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah 1,922,570 km², Indonesia dikategorikan yang terluas sebagai negara kepulauan dan memiliki setidaknya 17,508 pulau. Kondisi tersebut sangat mungkin mendongkrak potensi Indonesia diantara negara-negara di dunia untuk bisa memproduksi kebutuhan dari sektor pertanian. Indonesia tercatat juga sebagai negara pertanian, di mana 40% mata pencarian kebanyakan penduduk adalah bertani (Ayun et al., 2020). Sektor pertanian mempunyai peran besar dalam kesejahteraan masyarakat yang di Indonesia, kontribusi sektor pertanian juga terhadap ekonomi dan memenuhi keperluan asas masyarakat,

terutamanya dengan peningkatan jumlah penduduk yang bermakna keperluan makanan juga semakin meningkat.

Selain itu tolak ukur suatu negara mencapai kesuksesan dalam sektor agraris ialah tercapainya swasembada pangan dimasyarakat negara itu, bisa mengekspor hasil pertanian dan lain sebagainya. Negara Singapura merupakan contoh dengan swasembada pangan yang bisa dikatakan sangat berhasil, walaupun jika dilihat dari wilayah negaranya, Singapura mempunyai wilayah yaitu menjadi 704 km² (271,8 sq mi), namun diperkirakan dapat terus bertambah sekitar 100 km² (38,6 sq mi) di tahun 2030 dan negara Singapura tidak memiliki lahan pertanian namun APBN mereka mampu untuk membeli ketersediaan pangan untuk masyarakatnya dan tidak jarang pemerintah Singapura tidak mengambil keuntungan (Sariagri, 2021). Selanjutnya Seperti banyak pemerintahan Sahara sub-afrika, Nigeria sejak itu menerapkan program subsidi input bertarget berskala besar yang disebut program Skema Dukungan Peningkatan Pertumbuhan (GES) pada tahun 2012 program dilaksanakan dengan tujuan resmi yang luas untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan dengan membuat pupuk dan benih unggul lebih terjangkau dan dapat diakses oleh petani kecil (Wossen et al., 2017)

Pengertian pertanian secara luas ialah manakala sumber daya hayati yang dimanfaatkan oleh manusia dengan cara bercocok tanam agar dapat dipergunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari, sedangkan dalam arti secara sempit yaitu suatu budidaya tanaman yang dapat mencukupi kebutuhan pangan manusia (Yunus, 2022). Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam kehidupan, pembangunan dan ekonomi Indonesia. Sebagai sebuah negara agraria, sektor pertanian mampu memelihara sumber daya alam, menyediakan kehidupan dan mata pencarian, serta mewujudkan peluang pekerjaan. Berdasarkan luas panen serta hasil panen di negara Indonesia yaitu pada tahun 2022, luas panen sekitar 10452672.00 dan hasil panen padi sebesar 54748977.00 (BPS.go.id, n.d.). Untuk itu dengan hasil angka tersebut diharapkan pemerintah dapat mengekspor beras diberbagai negara bahkan ada kemungkinan jika negara kita ekspor beras akan berkali-kali lipat dari pendapatan sebelumnya

Untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di Indonesia perlu adanya kebijakan dan inovasi untuk menunjang kebutuhan para petani lokal, sedangkan inovasi pertanian sendiri di Indonesia saat ini ada pada level 0.3% dan untuk bisa bersaing dibutuhkan level tingkat inovasi 2%(Cybex.pertanian.go.id, 2019). Inovasi sendiri memiliki makna bahwa suatu program yang dijalankan pemerintah maupun instansi yang lain guna merubah atau memperbaiki suatu permasalahan yang sedang dihadapi diwilayahnya agar terciptanya keefektifan dan efisien dalam pelayanan diwilayah tersebut. dalam pelaksanaan pelayanan publik pada saat ini harus mengikuti arus dan perkembangan zaman (Setiawan & Ikbal, 2019).

Provinsi Jawa Timur merupakan dengan mayoritas kabupatennya berproduksi dari pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas yang paling unggul di Jawa Timur yaitu pertanian padi, data tersebut bisa dilihat pada tahun 2022-2023 hasil panen padi yaitu antara rentang bulan february-april yaitu sekitar 4.355.833- 4.451.818 Ton (BPS Catalogue, 2022). dan Jawa Timur ialah peringkat satu dalam hasil pertanian padi diantara provinsi yang lain. Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang notabene mata pencaharian masyarakatnya disektor pertanian.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang mempunyai potensi alam dengan kuantitas yang besar, seperti minyak dan gas bumi, lahan pertanian yang subur, dan kehutanan. Wilayah Bojonegoro yang ditunjang oleh keadaan iklim dan lahan yang subur, menjadi nilai unggul bagi kabupaten Bojonegoro dalam menumbuhkan ekonomi melalui sektor pertanian. Meskipun dengan didukung oleh lahan pertanian yang subur, para petani dulu belum bisa secara optimal mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi disektor pertanian. Masalah yang sering terjadi disektor pertanian di Bojonegoro diantaranya ialah benih dan pupuk dengan harga yang sangat mahal, pupuk bersubsidi yang kurang, harga jual hasil tanaman yang dari tahun ketahun yang berubah-ubah dan seringkali turun atau rendah, kurangnya regenerasi petani yang sangat kurang di Bojonegoro, dan gagal panen yang dialami para petani diakibatkan oleh beberapa macam faktor. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian memberikan solusi berupa kebijakan inovasi Program Petani Mandiri untuk masyarakat disektor pertanian.). Adapun munculnya PPM ini untuk

memberikan akses yang lebih cepat dan terpusat karena skala yang diprioritaskan mencakup hanya daerah Kabupaten, sedangkan jika dibandingkan dengan Kartu Tani Indonesia dari Kementerian Pertanian yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan dirasa kurang cepat dan tidak merata terhadap petani. Disisi lain program dari PPM ini juga memberikan beberapa manfaat yang berbeda dengan Kartu Tani Indonesia salah satunya asuransi gagal panen sedangkan di Kartu Tani Indonesia tidak ada program tersebut. Ide dan konsep mengenai keberadaannya mulai terbentuk. Dengan identifikasi masalah atau kebutuhan yang harus dipecahkan atau dipenuhi. Adanya Tim pengembang atau individu yang berperan dalam penciptaan program akan melakukan analisis mendalam untuk memahami persyaratan dan tujuan program yang akan dibangun.

Program Petani Mandiri adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro Khususnya para petani yang kurang mendapatkan akses pengembangan dari aspek SDM maupun aspek pengembangan usaha taninya. Tujuan objektif program ini antara lain untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri, serta Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah. Tercatat pada tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro telah mencetak 134,205 KPM yang telah diterima dengan rincian pada tahun 2019 sebanyak 19,966 KPM dan pada tahun 2020 sebanyak 50,967 KPM dari tahun 2021 hingga tahap VI sebanyak 63,272 KPM yang telah dicetak dan dianggarkan pada peringkat VII pada tahun 2021 akan terdapat sebanyak 2,425 KPM yang dicetak (dinperta.bojonegoro, 2021).

Gambar 1. 1 Kartu Petani Mandiri



Sumber: (Alfiani, 2019)

Dalam penerapan Program Petani Mandiri ini, luas panen di Kabupaten Bojonegoro terus membaik, namun bisa terjadi penurunan manakala kondisi alam yang tidak menentu. Berikut merupakan data table 1.1 dari luas panen di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 sampai 2021 berdasarkan hasil dari BPS Bojonegoro (BPS.go.id, 2021):

Tabel 1. 1 Luas Panen di Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 2020 Sampai 2021

No	Bulan	luas panen (Ha) 2020	luas panen (Ha) 2021
1	Januari	2,963	3,562
2	Februari	6,196	10,664
3	Maret	18,317	41,759
4	April	36,834	14,424
3	Mei	12,616	5,486
6	Juni	12,181	22.713
7	Juli	16,474	16,078
8	'Agustus,	13,374	1,65
9	September	5,044	3,91
10	Oktober	4,893	6,58
11	'Nopember	4246	3,781
12	Desember	2,496	4,002
	Jumlah_	135.635,	134,609

Sumber : BPS Bojonegoro (BPS.go.id, 2021)

Luas panen padi kabupaten Bojonegoro selama tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.026 hektar atau sebesar 0,76 persen.

Penyebab menurunnya luas panen di tahun 2021 adalah hewan parasite (hama) atau organisme pengganggu tanaman (OPT) dan banjir. terjadi pada areal panen tertinggi 41.759 hektar pada Maret 2021, disusul Juni, Juli, dan April Dengan luas panen 22.713 ha, 16.078 ha dan 14.424 ha. Luas panen terendah pada Agustus 2021 sebanyak 1.650. pada table data diatas adanya variasi panen puncak. Antara tahun 2020 dan 2021. Puncak panen tahun 2021 ada di bulan Itu terjadi pada bulan April pada Maret 2020.

Dalam luas panen yang terhitung diatas, tentunya ada produksi padi yang terus meningkat, namun terkait dari data diatas tentang luas panen dari tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan. Hal itu juga yang memepengaruhi hasil produksi padi di Kabupaten Bojonegoro, berikut ini table 1.2 hasil produksi padi pada tahun 2020 sampai dengan 2021 (BPS.go.id, 2021):

Tabel 1. 2 Hasil Produksi Padi Pada Tahun 2020 Sampai Dengan 2021

produksi padi	Tahun 2020	tahun 2021
Jan- (Ton-GKG)	353.666	372.732
Mei-Agst (Ton-GKG)	27.477	203.913
Sept-Des (Ton-GKG)	103.772	97.356
Jan-Des (Ton-GKG)	728.915	674. 002

Sumber : (BPS.go.id, 2021)

Produksi Padi di Kabupaten Bojonegoro dari Januari hingga Desember 2021 sebesar 674.002 ton GKG. Jika dilihat dari total produksi di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro menyumbang sebesar 6,88 persen dari seluruh total produksi GKG di Jawa Timur selama tahun 2021. Produksi tertinggi berada pada periode Januari-April yaitu sebesar 372.732 ton GKG, sedangkan produksi terendah berada di periode September-Desember yaitu sebesar 97.356 ton GKG. Produksi GKG selama tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 54.913 ton GKG atau sebesar 7,53 persen. Penurunan produksi GKG terjadi pada periode Mei-Agustus dan September-Desember yang dikarenakan adanya serangan hama

atau organisme pengganggu tanaman (OPT) dan banjir pada periode tersebut (BPS.go.id, 2021)

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada salah satu Desa yaitu Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Desa Sidomukti dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki lahan pertanian yang cukup luas, terdiri dari 375 hektar sawah pertanian dan 26 hektar sawah tegalan. Mayoritas masyarakat Desa Sidomukti berprofesi sebagai petani, yang terbukti dari adanya tujuh kelompok tani di desa ini, masing-masing beranggotakan rata-rata sekitar 120 orang. Jumlah kelompok tani di Desa Sidomukti adalah yang terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Kepohbaru. Keberadaan lahan pertanian yang luas serta jumlah kelompok tani yang signifikan menjadikan Desa Sidomukti sebagai lokasi yang ideal untuk penelitian ini, karena dapat memberikan data yang representatif dan relevan terkait dengan pertanian dan komunitas petani di daerah tersebut. (Simluhtan, 2022). hal ini menjadi acuan peneliti untuk memfokuskan penelitian terhadap Desa tersebut. Selanjutnya penulis lebih memfokuskan kepada keluhan atau permasalahan yang sering dialami oleh petani di Kabupaten Bojonegoro Khususnya di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru yaitu kurang pupuk subsidi dan mahal nya pupuk non subsidi yang menjadi titik masalah bagi petani untuk menanam padi. Hal ini mengacu pada Program petani Mandiri yang bisa membantu memberikan Bantuan Pupuk kepada para petani yang ada diwilayahnya melalui dana APBD.

Pada penelitian ini sudut pandang penulis lebih terfokus kepada implementasi Program Petani Mandiri yang diselenggarakan di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegor. Implementasi strategi secara umum lebih fokus pada pembuatan rencana, struktur, dan sistem yang bertujuan untuk mentransmisikan dan mensosialisasikan strategi yang dirumuskan secara top-down (Bellis *et al.*, 2023). Kemajuan implementasi kebijakan bergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti politik, sosial, ekonomi, organisasi, dan sikap. Namun peran aktor kebijakan dalam implementasi kebijakan tidak bisa diabaikan (Nazir *et al.*, 2023). Selanjutnya faktor-faktor yang terkait dengan objek yang diimplementasikan inovasi, intervensi, praktik berbasis bukti, dan sebagainya dianggap sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan upaya implementasi (Wensing *et al.*, 2022).

Selain itu motivasi yang kuat dan dirasakan secara luas merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi dengan motivasi yang jelas mendorong komitmen karyawan dan partisipasi, yang merupakan prasyarat keberhasilan implementasi (Vashishth *et al.*, 2024).

Hal lain yang menjadi alasan peneliti karena dalam melakukan penelitian Desa yang paling mudah bagi peneliti untuk melakukan observasi dan melakukan tinjauan langsung terhadap kondisi yang ada di Desa Sidomukti dan bagaimana proses pelaksanaan program ini dari atas sampai bawah. Berikutnya peneliti lebih leluasa dalam mendapatkan data dari para Pemangku Kepentingan yang ada Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro maupun pihak terkait lainnya.

Penulisan ini ialah suatu kajian dalam melihat bagaimana Implementasi kebijakan Program Petani mandiri (PPM) kepada masyarakat Bojonegoro khususnya Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru, sebagai salah satu kebijakan inovasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani kesejahteraan khususnya masalah pupuk yang mahal untuk para petani juga menganalisis program dalam kesuksesannya dalam hasil panen yang stabil dan meningkat. Selain itu juga ingin diperurai faktor penghambat dan pendukung Implementasi program ini. Dengan sejumlah pokok pembahasan tersebut, penelitian ditujukan untuk meninjau Program Petani Mandiri kabupaten bojonegoro untuk kesejahteraan petani khususnya di Desa Sidomukti

1.2 Rumusan Masalah

Program Petani Mandiri (PPM) merupakan Upaya pemerintah kabupaten bojonegoro yang ingin mensejahterakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dalam hal ini pemkab bojonegoro mengeluarkan inovasi tersebut dalam mengatasi masalah petani yang sudah disebutkan dilatar belakang dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengusahakan agar para petani yang belum terdaftar di Program Petani Mandiri (PPM) segera mendaftarkan diri agar mendapat fasilitas-fasilitas yang ada didalam inovasi tersebut. Untuk itu pertanyaan yang diajukan sebagai fokus pembahasan, berupa:

“Bagaimana implementasi kebijakan Program Petani Mandiri (PPM) di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?”

1.3 Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Petani Mandiri (PPM) di Kabupaten Bojonegoro khususnya Desa Sidomukti mengenai salah satu program yang ada Program Petani Mandiri yaitu Hibah Benih dan Pupuk”

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan Kegunaan kajian Penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Bisa dijadikan bahan rujukan, sebagai tambahan ilmu dan pengalaman untuk perkembangan ilmu tentang inovasi pertanian.
2. Bisa dijadikan bahan rekomendasi bagi Dinas Kethanan Pangan Dan Pertanian khususnya dalam mengkaji, membangun dan menilai pelaksanaan inovasi Program Petani Mandiri.
3. Hasil kajian yang dilakukan diharapkan mampu menjadi komparasi atau tolak ukur oleh pengkaji akan datang yang membincangkan atau meneliti tema yang serupa.

1.5 Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai langkah yang perlu dilakukan secara runtut dalam upaya pembentukan regulasi. Hasbullah (2015) dalam (Yuliah, 2020) menyatakan politik partisipatif itu terjadi dalam proses perumusan kebijakan politik, dimulai dari tahapan penetapan agenda dan pengambilan kebijakan, dimana aktivitas politik dipersepsikan sebagai suatu proses politik dan direpresentasikan sebagai rangkaian tahapan yang dikelompokkan secara kronologis dan berkaitan satu sama lain. pembuatan kebijakan, persetujuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Penciptaan teori kontingen untuk implementasi kebijakan, yang dapat mencapai keseimbangan multifaset antara sistem transportasi, sistem ekologi, dan pelestarian sejarah dan budaya, dapat difasilitasi oleh kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kawasan modern yang berkelanjutan dan layak huni (Li *et al.*, 2022).

Penelitian ini akan melihat implementasi kebijakan dalam sebuah program yang dikembangkan guna mencapai tujuan dari sebuah program itu sendiri. Menurut Ripley dan Franklin (1986:12) dalam jurnal (Imronah, 2009) Ripley mengangkat konsep pendekatan kepatuhan dan faktual dalam implementasi kebijakan yang berfokus kecocokan antar pegawai dalam prespektif strata jabatan.

Sementara perspektif kepatuhan mengedepankan telaah atas karakteristik serta kualitas dari perilaku pegawai. Menurut Ripley, setidaknya ada dua kesenjangan dalam perspektif kepatuhan: (1) Terdapat beragam faktor yang bukan merupakan unsur birokrasi yang mampu mempengaruhi, namun tidak dipertimbangkan, dan (2) Perancangan terhadap program yang tidak terlaksana dengan baik. Pandangan selanjutnya berupa pandangan praktis, yang berpendapat bahwasanya proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor yang mengharuskan pelaksana kebijakan lebih fleksibel dan melakukan penyesuaian. Kedua pandangan ini tidak saling bertentangan namun saling melengkapi.

2. Program Petani Mandiri (PPM)

Program Petani Mandiri ialah program untuk membantu mensejahterakan para petani di kabupaten Bojonegoro Inovasi kebijakan ini muncul karena adanya berbagai masalah di sektor pertanian yang mengancam gagal panen, Program ini dirancang khusus sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan petani di Kabupaten Bojonegoro.

1.6 Definisi Operasional

Untuk memudahkan penelitian, diperlukan definisi operasional untuk memahami indikator yang ditunjuk. Bagian yang memberikan petunjuk bagaimana menilai variabel disebut definisi operasional. Anda dapat meninjau variabel sekaligus menilainya dengan menggunakan indikator atau parameter yang ada. Menurut Ripley dan Franklin (1986:12) dalam buku karya (Anggara, 2014), kriteria penentuan efektivitas implementasi didasarkan pada tiga faktor, yaitu:

- a. Tahap kepatuhan birokrasi dengan birokrasi di atasnya atau tahap birokrasi sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang
- b. Terdapat rutinitas yang lancar dan tidak ada masalah
- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang diinginkan daripada semua program sedia ada diarahkan

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Teknik deskriptif digunakan dalam metodologi penelitian. Kedepannya pendekatan penelitian deskriptif ini semoga bermanfaat untuk analisis data

penulisan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Sistem et al., 2018), metode kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perkataan lisan atau tulisan orang dan perilaku yang dilihat. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tidak dibatasi oleh pendekatan deskriptif. Kapasitas peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan juga sebagian besar bergantung pada observasi dan wawancara (Yuliani et al., 2023)

Sehingga agar dapat berkonsentrasi terhadap permasalahan yang diangkat dengan mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi dari narasumber tentang kebijakan Program Petani Mandiri di Kabupaten Bojonegoro

2. Subjek Penelitian

Penelitian yang dilakukan diperkuat dengan informasi dari pihak-pihak terkait yang ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Informan dalam penelitian ini secara khusus adalah mereka yang mengetahui dan memahami konsentrasi penelitian tentang kebijakan Program Petani Mandiri (PPM) di kabupaten Bojonegoro

Adapun informan pada penelitian ini antara lain:

- a.) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pembiayaan yang Ada diruang lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Peneliti menganggap informan mengetahui dengan baik tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, karena informan tersebut bekerja dalam instansi yang menangani terkait kebijakan program tersebut.
- b.) Petugas Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Peneliti menganggap informan mengetahui dengan baik tentang kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan pelayanan program tersebut, karena informan bekerja di bidang terkait dengan penelitian yang peneliti teliti. Selain itu informan merupakan pelaksana pelayanan Program Petani Mandiri (PMM)
- c.) sekretasis Gapoktan Desa Sidomukti yang anggota kelompoknya telah mendapatkan Program Petani mandiri. Peneliti menganggap informan tersebut mengetahui kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan pelayanan PPM, karena informan mendapatkan pelayanan dari PPM

d.) Petugas penyuluh pertanian Kecamatan Kepohbaru menjadi informan terakhir yang bisa mengetahui bagaimana kondisi petani dan kondisi area tanam padi di Kecamatan Kepohbaru.

Adapun informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian yang dinilai mampu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dan relevan dengan program yang diteliti, berupa:

1. Kepala bidang SDM dan Pembiayaan : Yuni Arba'atun, SP, MM
2. Petugas Penyuluh Pertanian : Selvi Virginita Orizanti, AMd
3. Sekretaris GAPOKTAN Desa Sidomukti : Fauzi
4. Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan : Putra

3. Sumber Data

Penelitian dengan konsep kalitatif, menggunakan sejumlah jenis data baik berupa primer maupun sekunder. Berikut dirincikan lebih dalam:

a) Data Primer

Segala bentuk bahan penelitian yang dikumpulkan secara langsung (tanpa menggunakan perantara) dari sumber asli, termasuk orang dan organisasi, disebut sebagai data primer. Hasilnya, informasi langsung dikumpulkan. Permasalahan penelitian langsung diatasi dengan menggunakan data primer.

Mengingat penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian kualitatif, maka sumber data utama yang digunakan adalah wawancara, yang menyediakan data yang digunakan pada awalnya. Untuk mengumpulkan data atau pertanyaan yang dicari dari responden dan menggunakannya untuk memberikan informasi data penting untuk penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang relevan dengan topik penelitian. Kepala dinas ketahanan pangan, petugas pelayanan PPM, dan pihak yang terdaftar dalam Program Petani Mandiri merupakan informan yang dijadwalkan untuk diwawancara.

b) Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelum pelaksanaan proyek studi disebut sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup hal-hal seperti laporan, catatan sejarah, dan bukti yang dikumpulkan dari arsip atau dokumentasi data.

Dalam penelitian, data sekunder digunakan untuk mendukung dan menyempurnakan data utama. Data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dikumpulkan dari jurnal, literatur, penelitian terdahulu, dan media massa yang mendukung penelitian ini. Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri, dan Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten nomor 48 tahun 2018, Program Petani Mandiri merupakan dokumen tambahan yang bersifat wajib.

4. Teknik Pengumpulan Data

Marshall, & Rossman (Fadli, 2021), pertimbangan harus diberikan untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif karena keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan untuk melakukan penelitian sangat mempengaruhi kualitasnya. Apa, Dimana, Kapan, dan Bagaimana selalu diperhitungkan saat mengumpulkan data. Biasanya, penelitian kualitatif menggunakan triangulasi data dari tiga sumber yang berbeda, termasuk observasi partisipan, wawancara, dan analisis dokumen.

Untuk mengumpulkan berbagai informasi yang ada, dapat menggunakan hasil wawancara informan, observasi yang dilakukan pada lembaga atau lokasi penelitian, serta dokumentasi yang dibuat untuk mencatat dan mencatat berbagai informasi yang ada. Berbagai jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut, seperti:

a. Observasi

Salah satu metode pengumpulan informasi adalah dengan observasi terhadap fenomena sosial yang diteliti. Perumusan masalah dan perbandingan terhadap faktualisasi yang juga berkaitan dengan observasi (Amtai Alaslan, 2022). Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi subjek penulisan, waktu serta bagaimana penulisan berlangsung. Interaksi antara partisipan dan pengamat diperlukan selama observasi agar penulis dapat mengumpulkan data dengan bantuan mereka. Dalam proyek ini, peneliti akan magang di kantor Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian untuk mengamati pelaksanaannya.

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2007: 410) sebagai pertukaran arus informasi antara dua orang melalui pertukaran tanya jawab sehingga dapat dibangun makna yang mendalam dari suatu objek tertentu. Kemudian Fathan menambahkan, wawancara merupakan salah satu jenis komunikasi lisan yang dapat terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan narasumber (Amtai Alaslan, 2022) Purposive sampling merupakan strategi yang akan peneliti terapkan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara semi terstruktur terhadap responden penelitian yang sesuai dengan persyaratan untuk memahami permasalahan terkait penelitian. Agar peneliti dapat menciptakan pertanyaan atau tanggapan yang menyimpang dari daftar pertanyaan yang direncanakan dan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tepat dan menyeluruh.

c. Dokumentasi

Untuk memastikan bahwa materi terkait penelitian dibuat dengan jelas, akurat, dan dapat diandalkan, dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang meninjau dan mendokumentasikan informasi dari laporan atau arsip. Sebab jika informasi hanya dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, maka derajat validitas datanya masih belum terwakili dalam penyusunan karya ilmiah. Oleh karena itu, dokumentasi pendukung yang mengacu pada inovasi kebijakan Program Petani Mandiri harus disediakan. Hal ini dapat berupa catatan, gambar, statistik, perundang-undangan, atau studi sebelumnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian kabupaten Bojonegoro Yang beralamat di Jalan Raya Sukowati No. 412 Kapas, Bojonegoro Dan Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif yang mencakup pengamatan yang lebih jelas dan sederhana untuk memperoleh fakta objektif.

6. Teknik Analisis Data

Tujuan dari strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan pemahaman peneliti terhadap data yang dikumpulkan dari observasi lapangan serta data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Tiga

jenis kegiatan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi—digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data menggunakan analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Fadli, 2021). Dengan menggunakan data ini, sebuah narasi akan tercipta yang secara akurat menggambarkan jalannya peristiwa. Memanfaatkan langkah-langkah metodologi analisis data Miles dan Huberman sebagaimana yang tertuang dalam karya (Abdussamad, 2022) berikut ini:

a) Reduksi data (Data reduction)

Langkah proses ketika rincian penting dipilih dan diringkas disebut reduksi data. Fokus pada detail penting, perhatikan tren dan tema, dan saring detail yang tidak penting. Akibatnya, data yang diringkas akan menyajikan gambaran yang lebih koheren dan memudahkan pengumpulan dan pencarian data di masa depan bagi peneliti sesuai kebutuhan. Alat elektronik juga dapat membantu reduksi data dengan menyediakan fitur-fitur unik yang memudahkan prosesnya.

b) Penyajian data (Data display)

Penyajian data dilakukan berikutnya setelah reduksi data selesai. Hal ini dicapai melalui penggunaan bagan, penjelasan, dan alat serupa lainnya. Pada tahap ini argumen diperjelas dan tindakan dipandu oleh pemahaman dan analisis fakta yang disajikan dalam penyajian data. Setelah itu, data yang telah dikategorikan ke dalam banyak kelompok dijelaskan untuk menemukan hubungan antar kumpulan data yang berbeda.

c) Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing)

Pada titik ini, penilaian dibuat berdasarkan semua informasi yang dikumpulkan selama penyelidikan. keputusan atau bukti dalam upaya untuk menentukan atau memahami tujuan, serta struktur, pembenaran, dan sebab akibat. Sebelum mengambil kesimpulan apa pun, informasi yang diperoleh melalui identifikasi informasi, pembentukan opini, atau analisis penelitian harus diperhitungkan. Langkah terakhir dari penyelidikan sebelum peneliti membuat temuan apa pun adalah menentukan kelayakan. Pembuatan kesimpulan merupakan tahap terakhir setelah menganalisis data penelitian.